

ABDIKU NEGERI: JURNAL PENGABDIAN UNTUK PENDIDIKAN

MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN UM KENDARI

✉ abdikujurnal@gmail.com

Penguatan Kapasitas Digital, Partisipasi Komunitas, dan Konservasi Lingkungan di Pantai Wale

Andi Syaiful Zainal¹, La Ode Wahyuddin², Arsalim³, Abd. Rahman⁴, Wahyuddin⁵, Laode Abd. Harlan⁶, Andi Awaluddin Ma'ruf⁷, Patta Hindi⁸, Muh. Nato Alhaq⁹, Darwan Sari¹⁰, Muh. Nasir¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

¹¹ Ilmu Pemerintahan, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email korespodensi: andi.syaiful@umkendari.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK	
Riwayat Artikel Diterima: 00-00-0000 Direvisi: 00-00-0000 Diterima: 00-00-0000	Pengembangan wisata pesisir berbasis masyarakat memerlukan penguatan kapasitas digital, partisipasi komunitas, dan kepedulian terhadap lingkungan secara terpadu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan Pantai Wale, Desa Ulusawah, Kabupaten Konawe Utara. Pengabdian dilaksanakan dengan pendekatan <i>participatory community empowerment</i> melalui tiga intervensi, yaitu pelatihan pembuatan media promosi wisata menggunakan Canva, Gerakan Pantai Bersih dan Sadar Wisata, serta penanaman bibit pohon kelapa. Evaluasi menggunakan pendekatan <i>output-outcome assessment</i> melalui observasi, praktik, dokumentasi, dan refleksi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengalaman praktis dalam menghasilkan media promosi digital, masyarakat terlibat dalam aksi kolektif menjaga kebersihan kawasan, dan penanaman pohon menjadi inisiasi konservasi lingkungan pesisir. Program juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, Karang Taruna, pelaku UMKM, masyarakat, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Capaian program terutama berada pada tingkat <i>output</i> dan <i>short-term outcome</i> , sedangkan dampak jangka panjang masih memerlukan monitoring berkelanjutan. Keberlanjutan program diarahkan melalui penguatan <i>local ownership</i> dalam pengelolaan media promosi, kebersihan kawasan, dan pemeliharaan vegetasi pesisir.	
Kata Kunci kapasitas digital; konservasi lingkungan; partisipasi komunitas; pemberdayaan masyarakat; wisata pesisir.		

PENDAHULUAN

Pariwisata perdesaan semakin dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam pembangunan wilayah karena dapat memperkuat ekonomi lokal, mendiversifikasi sumber penghidupan masyarakat, menciptakan peluang kewirausahaan, serta mendorong

pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan. World Tourism Organization (2023) menegaskan bahwa pariwisata perdesaan memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan rantai nilai, peningkatan kewirausahaan, serta distribusi manfaat ekonomi dan sosial ke wilayah perdesaan. Namun, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis. Keberhasilannya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas masyarakat, infrastruktur, konektivitas, kemampuan kewirausahaan, serta kapasitas destinasi dalam merespons perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dengan demikian, pengembangan pariwisata perdesaan perlu dipahami bukan hanya sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi sebagai proses pembangunan lokal yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, teknologi, dan lingkungan (World Tourism Organization, 2023). Temuan berbagai kajian sistematis juga menunjukkan bahwa pariwisata perdesaan dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan tekanan terhadap struktur sosial, lingkungan, dan nilai-nilai lokal apabila pengembangannya tidak menempatkan masyarakat sebagai aktor utama (Li et al., 2024).

Dalam perkembangan tersebut, transformasi digital menjadi salah satu faktor yang semakin menentukan kemampuan destinasi perdesaan untuk membangun visibilitas dan menjangkau pasar wisatawan. Media sosial, platform digital, konten visual, dan berbagai saluran pemasaran daring memungkinkan destinasi dengan keterbatasan sumber daya promosi untuk membangun komunikasi langsung dengan calon wisatawan dan memperluas jangkauan pasar. Kajian mengenai digitalisasi pariwisata perdesaan menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung promosi, penyebaran informasi, pengelolaan pengalaman wisata, dan pengembangan daya saing destinasi. Namun, digitalisasi tidak dapat direduksi menjadi persoalan ketersediaan perangkat atau akses terhadap internet. Efektivitas transformasi digital sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, literasi digital, kemampuan produksi konten, tata kelola, serta kemampuan masyarakat untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pengelolaan destinasi (Rasyidah et al., 2023). Dengan demikian, kesenjangan digital pada destinasi perdesaan tidak hanya berkaitan dengan digital access, tetapi juga dengan digital capability, yaitu kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara produktif dan strategis.

Pentingnya kapasitas masyarakat dalam transformasi digital semakin terlihat dalam penelitian Lapuz (2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pariwisata perdesaan dapat memperluas bentuk pemberdayaan masyarakat, termasuk peningkatan kemampuan teknis, kemampuan menetapkan tujuan pengembangan, serta penguatan posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital yang berkelanjutan memerlukan pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada teknologi menuju pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan. Teknologi akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila masyarakat memiliki kemampuan untuk memproduksi informasi, mengelola komunikasi digital, membangun identitas destinasi, dan menggunakan data serta platform digital untuk mendukung keputusan pengembangan wisata (Lapuz, 2023). Penelitian mutakhir di Indonesia juga

menunjukkan bahwa efektivitas transformasi digital pada pariwisata perdesaan dipengaruhi bukan hanya oleh teknologi, tetapi oleh kompetensi branding, modal manusia, koordinasi narasi destinasi, dan tata kelola kelembagaan (Wijana et al., 2026).

Dalam konteks Indonesia, penggunaan media digital dalam pengembangan desa wisata menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat. Maulana et al. (2025), misalnya, menemukan bahwa integrasi komunikasi pemasaran digital dengan partisipasi masyarakat dapat mendukung daya tarik wisata sekaligus agenda keberlanjutan pada Desa Wisata Sumberbulu. Platform seperti media sosial dan berbagai kanal digital dapat digunakan untuk mengkomunikasikan daya tarik budaya dan ekologis sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digital marketing akan lebih bermakna apabila tidak hanya diposisikan sebagai instrumen promosi, tetapi diintegrasikan dengan partisipasi masyarakat dan pengelolaan destinasi. Dengan perspektif tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang dipromosikan melalui media digital, tetapi menjadi produsen informasi, pengelola identitas destinasi, dan aktor yang berkontribusi dalam penciptaan nilai wisata (Maulana et al., 2025).

Penguatan kapasitas digital masyarakat juga menjadi penting karena banyak destinasi perdesaan memiliki potensi alam dan budaya yang besar tetapi belum memiliki kemampuan komunikasi pemasaran yang memadai. Program pengembangan media promosi digital berbasis masyarakat di Desa Cirarab, misalnya, menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman pemasaran digital dan ketersediaan sarana promosi dapat menjadi hambatan bagi pengembangan desa wisata. Intervensi berupa pengembangan media promosi berbasis komunitas diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan menyediakan perangkat komunikasi yang dapat digunakan dalam promosi destinasi (Prihanto et al., 2025). Hal serupa terlihat dalam program pemberdayaan BUMDes di Desa Wringinputih yang menggabungkan penguatan sumber daya manusia, branding, dan digital marketing untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan serta promosi paket wisata desa (Yuliani et al., 2025). Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pelatihan digital untuk masyarakat desa sebaiknya diarahkan pada kemampuan praktis dan menghasilkan digital assets yang dapat digunakan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Namun, pengembangan pariwisata perdesaan, khususnya di kawasan pesisir, tidak dapat dilepaskan dari persoalan keberlanjutan lingkungan. Kawasan pantai merupakan sumber daya wisata yang memiliki nilai ekonomi dan rekreatif, tetapi juga memiliki kerentanan ekologis yang tinggi. Peningkatan aktivitas wisata dapat berkaitan dengan peningkatan produksi sampah, tekanan terhadap kualitas lingkungan, perubahan penggunaan ruang, serta degradasi ekosistem apabila tidak diikuti dengan tata kelola lingkungan yang memadai. Kajian sistematis mengenai keberlanjutan lingkungan dalam pariwisata perdesaan menunjukkan bahwa komunitas, pelaku usaha, wisatawan, pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran dalam mendorong atau menghambat praktik keberlanjutan lingkungan (Madanaguli et al., 2023). Oleh karena itu, keberlanjutan destinasi tidak cukup ditentukan oleh kualitas

daya tarik wisata, tetapi juga oleh kemampuan para aktor lokal dalam menjaga sumber daya yang menjadi fondasi kegiatan pariwisata.

Partisipasi masyarakat menjadi semakin penting ketika pengembangan pariwisata berhadapan dengan kebutuhan konservasi lingkungan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan, kepentingan, pengalaman, dan hubungan langsung dengan sumber daya yang dikembangkan sebagai objek wisata. Karena itu, keterlibatan mereka dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan dapat memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi. Kajian mengenai *community-based tourism* menunjukkan bahwa penelitian dalam bidang ini semakin menekankan hubungan antara partisipasi pemangku kepentingan, pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi, kepuasan masyarakat, dan konservasi warisan alam maupun budaya (Krittayaruangroj et al., 2023). Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan wisata, bukan hanya sebagai penerima manfaat atau tenaga pendukung kegiatan wisata.

Dalam konteks wisata bahari Indonesia, hubungan antara keterlibatan masyarakat dan dampak pariwisata juga telah memperoleh perhatian empiris. Riyanto et al. (2023), melalui penelitian terhadap masyarakat pesisir di Kabupaten Malang, menganalisis hubungan antara keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan persepsi terhadap dampak lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi. Studi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat perlu dipahami bersama dengan bagaimana masyarakat mempersepsikan dampak pariwisata terhadap kehidupan mereka. Dengan demikian, partisipasi tidak semata-mata diukur berdasarkan jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan, tetapi juga perlu dikaitkan dengan kualitas pengalaman, persepsi manfaat, dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Riyanto et al., 2023).

Perspektif tata kelola semakin memperkuat kebutuhan untuk mengintegrasikan pemberdayaan, partisipasi, dan keberlanjutan lingkungan. Reina-Usuga et al. (2024), melalui kajian terhadap perkembangan penelitian mengenai inisiatif pariwisata perdesaan, menunjukkan semakin kuatnya perhatian terhadap *collaborative governance* dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan pariwisata perdesaan cenderung bergerak dari pola hierarkis menuju pola yang lebih horizontal dan kolaboratif. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan destinasi membutuhkan mekanisme koordinasi yang memungkinkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, organisasi lokal, akademisi, dan aktor lainnya berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi (Reina-Usuga et al., 2024).

Penguatan partisipasi juga perlu disertai dengan sistem pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat sekaligus memiliki kapasitas untuk mengelola destinasi secara mandiri. Tong et al. (2024) menempatkan *tourism empowerment* dan *community participation* sebagai komponen penting dalam pembangunan pariwisata perdesaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan menjadi penting karena ketimpangan distribusi manfaat dan lemahnya sistem pengelolaan destinasi dapat menjadi hambatan terhadap keberlanjutan. Dengan demikian, intervensi pengembangan pariwisata tidak cukup menghasilkan fasilitas atau aktivitas baru, tetapi perlu memperkuat

kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan mempertahankan manfaat ekonomi serta sosial yang dihasilkan dari kegiatan wisata (Tong et al., 2024).

Perspektif tersebut relevan bagi kawasan Pantai Wale di Desa Ulusawah, Kabupaten Konawe Utara. Pantai Wale memiliki potensi wisata alam melalui panorama pantai dan lingkungan pesisir yang relatif alami. Di sisi lain, masyarakat Desa Ulusawah memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan perikanan, pertanian, dan usaha mikro yang dapat menjadi basis diversifikasi ekonomi apabila dikembangkan secara terintegrasi dengan aktivitas pariwisata. Akan tetapi, berdasarkan identifikasi awal program pengabdian, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas promosi digital masyarakat, praktik pengelolaan kebersihan kawasan wisata, dan kegiatan konservasi lingkungan pesisir yang sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan intervensi yang tidak hanya berorientasi pada promosi destinasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dan tanggung jawab ekologis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, program pengabdian kepada masyarakat di Pantai Wale dikembangkan melalui tiga bentuk intervensi yang saling berkaitan, yaitu (1) pelatihan pembuatan media promosi wisata menggunakan Canva, (2) gerakan Pantai Bersih dan Sadar Wisata, dan (3) penanaman bibit pohon kelapa di kawasan pesisir. Pelatihan Canva diarahkan kepada aparat desa, Karang Taruna, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan materi promosi visual yang informatif dan menarik. Gerakan Pantai Bersih diarahkan tidak hanya pada pengumpulan sampah, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan, pengelolaan lingkungan, dan prinsip Sapta Pesona. Sementara itu, penanaman pohon kelapa diarahkan sebagai intervensi awal untuk memperkuat vegetasi kawasan sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai hubungan antara kualitas lingkungan dan keberlanjutan destinasi.

Pendekatan terpadu tersebut sejalan dengan perkembangan *community-based digital tourism*, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor dalam produksi nilai wisata, promosi destinasi, dan pengelolaan lingkungan. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi komunikasi pemasaran digital dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengembangan destinasi berkelanjutan (Maulana et al., 2025), sedangkan kajian mengenai keberlanjutan *community-based tourism* menunjukkan bahwa partisipasi, pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi, dan konservasi merupakan tema yang saling berhubungan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan (Krittayaruangroj et al., 2023). Dengan demikian, integrasi kemampuan digital, partisipasi masyarakat, dan *environmental stewardship* memberikan dasar yang lebih komprehensif bagi pengembangan destinasi wisata pesisir berbasis masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yaitu kecenderungan evaluasi yang lebih menekankan *activity outputs* daripada *community outcomes*. Banyak program pengabdian mendokumentasikan jumlah peserta pelatihan, produk promosi yang dihasilkan, kegiatan kebersihan, atau jumlah tanaman yang ditanam, tetapi belum selalu menjelaskan sejauh mana intervensi

tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas, perubahan perilaku, rasa memiliki, kemampuan mengelola program, dan keberlanjutan praktik setelah program selesai. Padahal, keberhasilan pemberdayaan seharusnya tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya kegiatan, tetapi oleh kemampuan masyarakat untuk mempertahankan, mengadaptasi, dan mengembangkan praktik yang diperkenalkan melalui intervensi. Literatur mengenai pemberdayaan masyarakat dalam transformasi digital menunjukkan bahwa penguatan kemampuan teknis dan posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari proses transformasi, bukan sekadar keberadaan teknologi (Lapuz, 2023).

Kesenjangan tersebut penting dalam konteks Pantai Wale karena pelatihan media promosi, gerakan kebersihan, dan penanaman pohon merupakan tiga intervensi yang menghasilkan jenis output berbeda tetapi memiliki tujuan jangka panjang yang sama, yaitu membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi. Pelatihan menghasilkan perangkat dan keterampilan promosi digital; gerakan Pantai Bersih menghasilkan pengalaman kolektif dan peningkatan kesadaran lingkungan; sedangkan penanaman pohon menghasilkan intervensi awal konservasi pesisir. Dengan demikian, program ini dapat dipahami sebagai proses pembelajaran komunitas yang menghubungkan *digital capability*, *community participation*, dan *environmental stewardship* dalam satu konteks destinasi wisata pesisir.

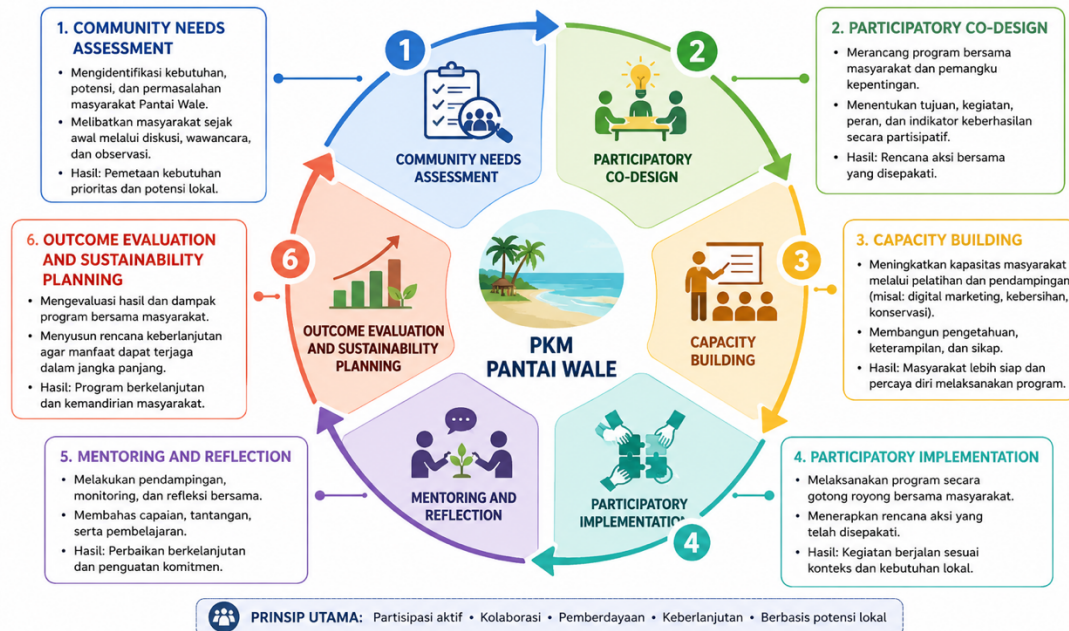
Berdasarkan argumentasi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terpadu di Pantai Wale, Desa Ulusawah, Kabupaten Konawe Utara, melalui tiga dimensi utama: penguatan kapasitas digital untuk promosi wisata, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan dan kesadaran wisata, serta inisiasi konservasi lingkungan pesisir. Secara khusus, artikel ini menganalisis bentuk intervensi, capaian program, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasinya terhadap keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Kontribusi artikel terletak pada upaya menghubungkan tiga dimensi yang sering dibahas secara terpisah—pemberdayaan digital, partisipasi lingkungan, dan *community-based tourism*—dalam satu model intervensi pada destinasi wisata pesisir perdesaan. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang tidak berhenti pada pencapaian *activity outputs*, tetapi diarahkan pada pembentukan kapasitas komunitas yang lebih mandiri dalam mempromosikan, mengelola, dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata.

METODE

1. Desain dan Pendekatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan *participatory community empowerment* (Gambar 1) yang mengintegrasikan prinsip *community-based tourism (CBT)*, *capacity building*, dan *service-learning*. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan yang dihadapi masyarakat Pantai Wale tidak bersifat tunggal, tetapi mencakup keterbatasan kapasitas digital untuk promosi

wisata, rendahnya praktik kebersihan kawasan wisata, dan terbatasnya aktivitas konservasi lingkungan pesisir. Oleh karena itu, intervensi dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kemampuan praktis, mendorong keterlibatan masyarakat dalam tindakan kolektif, dan meletakkan dasar bagi keberlanjutan program.



Gambar 1. Desain PkM Pantai Wale *Participatory Community Empowerment Cycle*

Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra pengembangan, bukan sebagai penerima program secara pasif. Perspektif ini penting karena penelitian mengenai community-based tourism menunjukkan bahwa partisipasi dan pemberdayaan memiliki hubungan timbal balik: kapasitas pemberdayaan memengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sementara pengalaman berpartisipasi dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat (Bello et al., 2023). Kajian bibliometrik terhadap 869 publikasi terindeks Scopus juga menunjukkan bahwa stakeholder *participation, decision-making*, pemberdayaan ekonomi, dan konservasi merupakan tema sentral dalam pengembangan CBT berkelanjutan (Krittayaruangroj et al., 2023).

Dalam konteks perguruan tinggi, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *service-learning*, yaitu menghubungkan pembelajaran akademik mahasiswa dengan kebutuhan nyata masyarakat melalui pengalaman langsung. Kajian sistematis berbasis publikasi Scopus dan Web of Science menunjukkan bahwa *service-learning, community engagement, participatory action research*, dan *capacity development* merupakan pendekatan penting dalam pembelajaran berbasis keberlanjutan di perguruan tinggi (Rodriguez et al., 2024).

2. Lokasi, Mitra, dan Peserta

Kegiatan dilaksanakan di Pantai Wale, Desa Ulusawah, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, pada 25–26 Juli 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada potensi Pantai Wale sebagai destinasi wisata pesisir serta adanya kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam promosi digital, pengelolaan kebersihan, dan konservasi lingkungan. Laporan kegiatan mengidentifikasi tiga persoalan utama, yaitu keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital untuk promosi wisata, belum optimalnya kesadaran terhadap kebersihan kawasan, dan terbatasnya praktik konservasi pesisir.

Mitra kegiatan terdiri atas: 1) Pemerintah Desa Ulusawah; 2) Karang Taruna; 3) pelaku UMKM; 4) tokoh masyarakat; 5) masyarakat sekitar Pantai Wale; dan mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari. Dosen pendamping berperan sebagai fasilitator akademik, sedangkan mahasiswa berperan sebagai *community facilitators* yang membantu proses pelatihan, praktik, aksi lingkungan, dokumentasi, dan pendampingan. Struktur ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara perguruan tinggi dan masyarakat sebagaimana ditekankan dalam pendekatan *community engagement dan service-learning* (Rodriguez et al., 2024).

3. Evaluasi Program

Evaluasi menggunakan pendekatan *output–outcome assessment* (Tabel 1) untuk membedakan keberhasilan kegiatan dengan perubahan yang mulai muncul pada masyarakat. Evaluasi dibagi menjadi tiga tingkat:

Tabel 1. Evaluasi menggunakan pendekatan *output–outcome assessment*

Tingkat evaluasi	Indikator	Teknik
<i>Output</i>	Jumlah peserta, poster yang dihasilkan, aktivitas bersih pantai, bibit yang ditanam	Dokumentasi dan checklist
<i>Short-term outcome</i>	Kemampuan membuat poster, pemahaman promosi digital, kesadaran kebersihan, keterlibatan masyarakat	Observasi, praktik, wawancara/refleksi
<i>Sustainability outcome</i>	Pengelolaan media promosi, keberlanjutan kegiatan kebersihan, pemeliharaan tanaman	Komitmen mitra dan follow-up

Khusus untuk pelatihan Canva, evaluasi berbasis kinerja (*performance-based assessment*) digunakan dengan menilai produk poster yang dihasilkan peserta. Aspek penilaian meliputi kelengkapan informasi, keterbacaan, komposisi visual, identitas destinasi, dan kesiapan publikasi. Untuk program Pantai Bersih, evaluasi diarahkan pada keterlibatan peserta, perubahan kondisi kawasan, dan pemahaman masyarakat mengenai

kebersihan destinasi. Untuk penanaman pohon, indikator meliputi jumlah bibit tertanam dan adanya mekanisme pemeliharaan.

Pendekatan evaluasi ini penting karena keberhasilan PkM tidak seharusnya hanya ditentukan berdasarkan terlaksananya aktivitas. Dalam literatur community-based tourism, partisipasi tidak secara otomatis menghasilkan pemberdayaan; kualitas dan kedalaman keterlibatan masyarakat perlu diperhatikan (Bello et al., 2023).

4. Strategi Keberlanjutan

Keberlanjutan program dirancang melalui *local ownership mechanism*. Pemerintah Desa dan Karang Taruna diarahkan menjadi aktor lokal yang melanjutkan program setelah tim PkM meninggalkan lokasi. Strategi keberlanjutan mencakup: 1) Karang Taruna sebagai calon pengelola media promosi digital; 2) UMKM menggunakan materi digital untuk mempromosikan produk lokal; 3) pemerintah desa mendukung kegiatan promosi destinasi; 4) kegiatan kebersihan pantai dilakukan secara berkala; 5) masyarakat bertanggung jawab terhadap pemeliharaan bibit yang telah ditanam; dan 6) perguruan tinggi dapat melakukan pendampingan lanjutan. Strategi tersebut didasarkan pada prinsip bahwa intervensi pemberdayaan harus menghasilkan kapasitas lokal yang dapat bertahan setelah dukungan eksternal berakhir. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam transformasi digital yang menekankan pentingnya kemampuan teknis, pengambilan keputusan, dan posisi masyarakat sebagai aktor pembangunan (Lapuz, 2023).

5. Etika dan Prinsip Kemitraan

Pelaksanaan kegiatan berlandaskan prinsip kemitraan, partisipasi sukarela, penghormatan terhadap pengetahuan lokal, dan transparansi tujuan kegiatan. Masyarakat diposisikan sebagai mitra dalam proses pengembangan destinasi. Dokumentasi kegiatan dan penggunaan hasil karya masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan persetujuan dan kepentingan peserta. Pendekatan tersebut penting karena pengembangan CBT yang berkelanjutan membutuhkan mekanisme partisipasi yang tidak berhenti pada mobilisasi masyarakat, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari pengembangan destinasi (Krittayaruangroj et al., 2023; Bello et al., 2023).

HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Program

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 25–26 Juli 2026 di Pantai Wale, Desa Ulusawah, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kegiatan melibatkan pemerintah desa, Karang Taruna, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar, mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari, serta dosen pendamping. Program dirancang untuk merespons tiga persoalan utama yang ditemukan pada lokasi mitra, yaitu keterbatasan

kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi digital untuk promosi wisata, belum optimalnya kesadaran terhadap kebersihan kawasan wisata, dan masih terbatasnya praktik konservasi lingkungan pesisir. Berdasarkan permasalahan tersebut, intervensi dilaksanakan melalui tiga program yang saling melengkapi: (1) pelatihan pembuatan media promosi wisata menggunakan Canva, (2) Gerakan Pantai Bersih dan Sadar Wisata, dan (3) penanaman bibit pohon kelapa.

Secara konseptual, ketiga intervensi tersebut diarahkan untuk membangun tiga bentuk kapasitas masyarakat, yaitu *digital capability*, *collective environmental action*, dan *environmental stewardship*. Pendekatan semacam ini relevan dengan perkembangan *community-based tourism* yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor dalam pengembangan, pengelolaan, dan keberlanjutan destinasi. Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pariwisata perdesaan perlu disertai pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas teknis agar teknologi dapat digunakan secara produktif dalam pengembangan destinasi.

2. Hasil Pelatihan Pembuatan Media Promosi Wisata Menggunakan Canva

Intervensi pertama difokuskan pada penguatan kapasitas digital aparat desa, Karang Taruna, dan pelaku UMKM melalui pelatihan pembuatan poster promosi wisata (Gambar 2) menggunakan Canva. Materi mencakup pengenalan aplikasi, pembuatan akun, pemilihan template, penggunaan warna dan tipografi, penyusunan informasi destinasi, serta persiapan publikasi melalui media sosial. Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi memperoleh pendampingan langsung dalam menghasilkan poster promosi Pantai Wale. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta dapat mengikuti proses pembuatan desain dan menghasilkan materi visual promosi Pantai Wale. Dengan demikian, luaran pelatihan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi menghasilkan tangible digital output berupa desain poster yang dapat digunakan sebagai bahan komunikasi destinasi.



Gambar 2. Dokumentasi Pelatihan pembuatan poster promosi wisata menggunakan Canva

Berdasarkan observasi selama kegiatan, kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi digital menunjukkan variasi. Sebagian peserta dapat mengikuti proses desain dengan relatif cepat, sementara peserta dengan pengalaman digital yang lebih terbatas memerlukan pendampingan lebih intensif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan praktik langsung dan pendampingan individual diperlukan ketika intervensi digital diberikan kepada komunitas dengan tingkat literasi digital yang heterogen. Laporan kegiatan juga mengidentifikasi variasi kemampuan teknologi sebagai salah satu hambatan utama pelaksanaan program.

Temuan ini konsisten dengan studi pemberdayaan pariwisata digital yang menunjukkan bahwa kesenjangan literasi digital merupakan salah satu hambatan bagi pengelola wisata lokal. Program pemberdayaan di Desa Wisata Cibuntu, misalnya, menggunakan pelatihan praktis dan pendampingan teknis untuk meningkatkan kapasitas promosi digital masyarakat. Studi lain pada Curug Luhur juga menggunakan pelatihan pembuatan konten dan pendampingan pengelolaan akun digital sebagai strategi untuk memperkuat *community-based tourism*. Dengan demikian, hasil pelatihan Canva di Pantai Wale dapat dipahami sebagai inisiasi peningkatan kapasitas digital, terutama pada kemampuan praktis menghasilkan materi promosi wisata. Namun, karena kegiatan ini tidak menggunakan desain evaluasi pre-test-post-test, hasil tersebut belum dapat digunakan untuk menyatakan besaran peningkatan kompetensi secara statistik.

3. Hasil Gerakan Pantai Bersih dan Sadar Wisata

Intervensi kedua dilaksanakan melalui Gerakan Pantai Bersih dan Sadar Wisata (Gambar 3). Kegiatan meliputi aksi pengumpulan sampah, edukasi mengenai pengelolaan sampah, sosialisasi Sapta Pesona, dan kampanye mengenai pentingnya menjaga kebersihan kawasan wisata. Aktivitas dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan mahasiswa, pemerintah desa, Karang Taruna, pelaku UMKM, dan masyarakat. Hasil observasi menunjukkan adanya perubahan langsung pada kondisi fisik kawasan berupa kawasan pantai yang lebih bersih setelah kegiatan berlangsung. Selain perubahan kondisi lingkungan, kegiatan juga menghasilkan ruang interaksi antara mahasiswa dan masyarakat melalui aktivitas gotong royong.

Dari perspektif pemberdayaan, nilai penting kegiatan ini bukan hanya terletak pada volume sampah yang berhasil dikumpulkan, tetapi pada terbentuknya pengalaman kolektif dalam menjaga lingkungan destinasi. Keterlibatan masyarakat secara langsung memberikan kesempatan bagi peserta untuk menghubungkan kebersihan lingkungan dengan kualitas pengalaman wisata dan kenyamanan pengunjung.

Laporan kegiatan menunjukkan bahwa program menghasilkan beberapa perubahan awal, yaitu meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan, tumbuhnya semangat gotong royong, dan meningkatnya kepedulian terhadap kenyamanan wisatawan. Temuan tersebut sejalan dengan kajian mengenai *community-based sustainable tourism* yang menempatkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan, kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan sebagai dimensi yang saling berkaitan. Dalam konteks Indonesia, kajian sistematis juga menunjukkan bahwa model partisipasi masyarakat dapat

berkontribusi terhadap *environmental stewardship*, pemberdayaan ekonomi, dan konservasi ekosistem apabila partisipasi tersebut dibangun secara substantif. Dengan demikian, Gerakan Pantai Bersih dapat diposisikan sebagai intervensi awal pembentukan *environmental stewardship* berbasis komunitas, bukan sekadar kegiatan kerja bakti.



Gambar 3. Dokumentasi Gerakan Pantai Bersih dan Sadar Wisata

4. Hasil Penanaman Bibit Pohon Kelapa

Intervensi ketiga berupa penanaman bibit pohon kelapa (Gambar 4) di kawasan pesisir Pantai Wale. Kegiatan dilakukan bersama oleh mahasiswa dan masyarakat melalui

proses penentuan lokasi, penanaman, dan edukasi mengenai pentingnya pemeliharaan tanaman. Program diarahkan untuk meningkatkan tutupan vegetasi pesisir, memperindah kawasan wisata, serta memberikan potensi manfaat ekonomi dalam jangka panjang.



Gambar 4. Dokumentasi penanaman bibit pohon kelapa

Hasil langsung kegiatan berupa tertanamnya bibit pohon kelapa pada kawasan pesisir Pantai Wale. Selain menghasilkan luaran ekologis awal, kegiatan ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam tindakan konservasi. Namun, secara metodologis, manfaat ekologis jangka panjang seperti pengurangan abrasi atau peningkatan stabilitas tanah belum dapat disimpulkan dari kegiatan penanaman satu kali. Oleh karena itu, dalam artikel ini hasil kegiatan lebih tepat dinyatakan sebagai inisiasi konservasi pesisir dan pembentukan praktik *environmental stewardship*, sedangkan dampak ekologis jangka panjang memerlukan pemantauan lanjutan.

Pembedaan antara output dan outcome tersebut penting dalam evaluasi program pemberdayaan. Penanaman merupakan output, sedangkan keberlangsungan hidup tanaman, pemeliharaan oleh masyarakat, peningkatan tutupan vegetasi, dan perubahan kondisi ekologis merupakan outcome yang membutuhkan observasi longitudinal.

5. Integrasi Tiga Intervensi

Salah satu hasil penting program adalah terbentuknya hubungan antara tiga intervensi yang pada awalnya memiliki karakter berbeda. Pelatihan Canva berorientasi

pada kapasitas digital dan ekonomi; Pantai Bersih berorientasi pada partisipasi sosial dan kebersihan; sedangkan penanaman pohon berorientasi pada konservasi lingkungan. Ketiganya membentuk suatu *integrated community empowerment intervention* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. *Integrated community empowerment Intervention*

Dimensi	Intervensi	Output	Outcome awal
<i>Digital capability</i>	Pelatihan	Poster promosi	Peserta memiliki pengalaman praktis
	Canva	Pantai Wale	membuat media promosi digital
<i>Community participation</i>	Pantai Bersih dan Sadar	Aksi kolektif membersihkan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan
	Wisata	kawasan	Terbentuknya tindakan awal konservasi dan tanggung jawab pemeliharaan
<i>Environmental stewardship</i>	Penanaman pohon kelapa	Bibit tertanam	
<i>Local collaboration</i>	Kolaborasi perguruan tinggi–desa–masyarakat	Kegiatan lintas kelompok	Menguatnya hubungan kerja antara aktor lokal dan perguruan tinggi

Integrasi tersebut menjadi penting karena pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan promosi digital. Destinasi membutuhkan kombinasi kapasitas promosi, keterlibatan masyarakat, tata kelola lokal, dan pemeliharaan sumber daya yang menjadi daya tarik wisata. Literatur terbaru mengenai *community-based sustainable tourism* menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berorientasi ekonomi dan konservasi menuju pendekatan multidimensional yang mencakup pemberdayaan, tata kelola, kesejahteraan, resiliensi, dan inovasi digital.

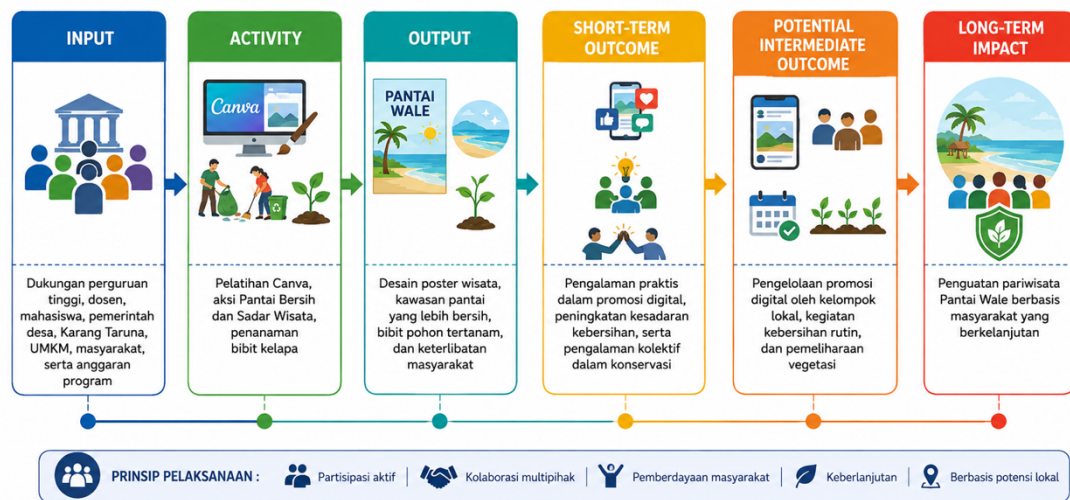
6. Partisipasi dan Respons Mitra

Partisipasi mitra merupakan salah satu faktor pendukung utama pelaksanaan program. Pemerintah Desa Ulusawah memberikan dukungan terhadap kegiatan, sedangkan Karang Taruna, pelaku UMKM, dan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan berbagai aktivitas. Laporan juga menunjukkan adanya antusiasme peserta dan kerja sama yang baik antara dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Partisipasi tersebut penting karena keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh transfer pengetahuan dari perguruan tinggi kepada masyarakat, tetapi oleh kemampuan masyarakat untuk mengadopsi, menggunakan, dan melanjutkan praktik yang diperkenalkan. Studi mengenai pemberdayaan dalam transformasi digital pariwisata menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan teknis perlu disertai penguatan posisi masyarakat sebagai aktor pengambilan keputusan dalam pengembangan destinasi.

Dalam konteks program Pantai Wale, keterlibatan berbagai kelompok lokal menunjukkan adanya social capital awal yang dapat menjadi modal bagi pengembangan program lanjutan. Namun, keberadaan partisipasi dalam satu kegiatan belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa telah terbentuk kelembagaan komunitas yang berkelanjutan. Hal tersebut memerlukan pengamatan lebih lanjut terhadap konsistensi keterlibatan masyarakat setelah program berakhir.

7. Capaian Program Berdasarkan Kerangka Output-Outcome

Berdasarkan kerangka *output-outcome*, hasil kegiatan dapat dirangkum sebagaimana terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Kerangka *output-outcome* program PkM Pantai Wale

Kerangka di atas memperlihatkan bahwa capaian program saat ini paling kuat pada level output dan *short-term outcome*. Bukti mengenai *intermediate outcome* dan *long-term impact* masih perlu dikembangkan melalui pendampingan dan pengukuran lanjutan. Perbedaan ini merupakan aspek penting untuk meningkatkan kredibilitas artikel pengabdian. Program pengabdian yang menggunakan pelatihan digital, misalnya, dapat menunjukkan peningkatan yang lebih kuat ketika memiliki indikator kuantitatif sebelum dan sesudah intervensi. Program pemberdayaan di Desa Wisata Cibuntu menggunakan pre-test dan post-test dan melaporkan perubahan penggunaan media sosial, kemampuan pembuatan konten, dan penggunaan platform pemesanan daring. Dengan demikian, untuk pengembangan PkM Pantai Wale berikutnya, evaluasi berbasis indikator kuantitatif perlu ditambahkan.

8. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan program memperoleh dukungan dari beberapa faktor. Pertama, adanya dukungan Pemerintah Desa Ulusawah memberikan legitimasi dan akses bagi tim PkM untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kedua, keterlibatan Karang Taruna dan

pelaku UMKM memperluas basis partisipasi. Ketiga, kerja sama antara dosen dan mahasiswa memungkinkan kegiatan dilaksanakan melalui pendampingan langsung.

Di sisi lain, terdapat dua hambatan utama, yaitu heterogenitas kemampuan digital peserta dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Kedua faktor tersebut memiliki implikasi terhadap desain program. Heterogenitas kompetensi menunjukkan perlunya pengelompokan peserta berdasarkan kemampuan awal, sedangkan keterbatasan waktu menunjukkan perlunya pendampingan pascakegiatan. Temuan ini konsisten dengan pengalaman program pemberdayaan pariwisata digital lainnya yang menunjukkan bahwa pelatihan satu kali belum cukup untuk menjamin penerapan keterampilan secara konsisten. Program digital tourism yang lebih intensif umumnya mengombinasikan pelatihan dengan *technical assistance*, *mentoring*, dan tindak lanjut.

9. Keberlanjutan Hasil Program

Keberlanjutan menjadi aspek penting dari hasil program karena tujuan akhir PkM bukan sekadar menghasilkan aktivitas selama dua hari, tetapi membangun kapasitas lokal yang dapat dipertahankan setelah tim perguruan tinggi meninggalkan lokasi. Laporan merekomendasikan agar pemerintah desa melanjutkan promosi digital, Karang Taruna menjadi pengelola media promosi, UMKM menggunakan materi digital untuk pemasaran, kegiatan kebersihan dilakukan secara rutin, dan bibit pohon dipelihara bersama. Berdasarkan rekomendasi tersebut, keberlanjutan program dapat diarahkan melalui tiga mekanisme: 1) *digital ownership*, yaitu pengelolaan media promosi oleh kelompok lokal; 2) *environmental ownership*, yaitu tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan pemeliharaan vegetasi; dan 3) *institutional ownership*, yaitu dukungan pemerintah desa untuk memasukkan kegiatan promosi dan pemeliharaan destinasi ke dalam agenda desa. Pendekatan ini penting karena literatur terbaru menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak selalu identik dengan pemberdayaan. Partisipasi yang berkelanjutan membutuhkan mekanisme kelembagaan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki peran, hak, dan kapasitas dalam pengelolaan destinasi.

PEMBAHASAN DAMPAK PENGABDIAN

1. Penguatan Kapasitas Digital Masyarakat dalam Promosi Destinasi

Pelatihan pembuatan media promosi wisata menggunakan Canva merupakan salah satu bentuk intervensi utama dalam program pemberdayaan masyarakat di Pantai Wale. Kegiatan ini ditujukan kepada aparat desa, Karang Taruna, dan pelaku UMKM dengan pendekatan demonstrasi, praktik langsung, dan umpan balik. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta mampu mengikuti tahapan pembuatan desain dan menghasilkan poster promosi Pantai Wale. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya menghasilkan transfer pengetahuan, tetapi juga menghasilkan produk digital yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi destinasi.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik lebih relevan untuk konteks masyarakat dengan tingkat kemampuan digital yang beragam. Selama

kegiatan ditemukan adanya perbedaan kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi, sehingga sebagian peserta membutuhkan pendampingan yang lebih intensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas digital masyarakat tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi membutuhkan proses *learning by doing* dan pendampingan sesuai dengan kemampuan awal peserta. Temuan tersebut sejalan dengan Lapuz (2023) yang menegaskan bahwa transformasi digital dalam pariwisata perdesaan perlu ditempatkan sebagai proses pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar penyediaan teknologi. Kapasitas teknis masyarakat menjadi penting agar teknologi dapat digunakan secara produktif dalam pengembangan destinasi. Dengan demikian, pelatihan Canva di Pantai Wale dapat dipandang sebagai langkah awal dalam membangun digital capability masyarakat, khususnya kemampuan menghasilkan materi promosi secara mandiri.

Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, capaian yang diperoleh tidak harus dipahami sebagai perubahan kompetensi yang telah selesai, melainkan sebagai inisiasi peningkatan kapasitas. Hal ini karena kegiatan belum menggunakan desain evaluasi *pre-test-post-test* sehingga besaran peningkatan kompetensi digital belum dapat diukur secara statistik. Naskah juga menunjukkan bahwa capaian pelatihan lebih tepat ditempatkan pada tingkat *short-term outcome*, yaitu munculnya pengalaman praktis dan kemampuan awal dalam membuat media promosi. Oleh karena itu, keberlanjutan intervensi digital perlu diarahkan pada penggunaan keterampilan tersebut setelah kegiatan berakhir. Karang Taruna dapat dikembangkan sebagai pengelola media promosi destinasi, sedangkan UMKM dapat memanfaatkan materi digital untuk memperkenalkan produk lokal. Strategi ini memungkinkan hasil pelatihan berubah dari sekadar produk kegiatan menjadi aset digital yang terus digunakan dalam pengelolaan destinasi.

2. Gerakan Pantai Bersih sebagai Penguatan Partisipasi Masyarakat

Intervensi kedua berupa Gerakan Pantai Bersih dan Sadar Wisata menunjukkan bahwa kegiatan lingkungan dapat sekaligus menjadi media pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui edukasi kebersihan, pengenalan *Sapta Pesona*, pembagian kelompok kerja, pemungutan dan pemilahan sampah, penataan kawasan, serta refleksi bersama. Pelaksanaan secara gotong royong melibatkan mahasiswa, pemerintah desa, Karang Taruna, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan langsung terhadap kondisi fisik kawasan, yaitu pantai menjadi lebih bersih setelah kegiatan berlangsung. Selain perubahan fisik tersebut, kegiatan juga menciptakan pengalaman kolektif antara masyarakat dan mahasiswa. Laporan kegiatan menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan, semangat gotong royong, dan kepedulian terhadap kenyamanan wisatawan.

Dalam konteks PkM, temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas kebersihan dapat dirancang sebagai intervensi perubahan perilaku, bukan sekadar kegiatan kerja bakti. Masyarakat memperoleh pengalaman langsung bahwa kualitas lingkungan merupakan bagian dari kualitas destinasi wisata. Dengan cara tersebut, edukasi lingkungan tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan kolektif. Temuan ini

relevan dengan Bello et al. (2023), yang menunjukkan adanya hubungan antara partisipasi dan pemberdayaan dalam *community-based tourism*. Pengalaman berpartisipasi dapat memperkuat kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan destinasi. Sementara itu, Krittayaruangroj et al. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan, pemberdayaan, dan konservasi merupakan tema yang saling berhubungan dalam pengembangan *community-based tourism* berkelanjutan. Dengan demikian, Gerakan Pantai Bersih di Pantai Wale dapat diposisikan sebagai inisiasi *environmental stewardship* berbasis masyarakat. Namun, perlu dibedakan antara perubahan kondisi kawasan setelah kegiatan dan perubahan perilaku jangka panjang. Pantai yang lebih bersih segera setelah aksi merupakan capaian kegiatan, sedangkan terbentuknya kebiasaan menjaga kebersihan secara rutin merupakan outcome yang membutuhkan pemantauan lebih lanjut.

3. Penanaman Pohon sebagai Inisiasi Konservasi Pesisir

Penanaman bibit pohon kelapa merupakan bentuk intervensi lingkungan yang diarahkan untuk memperkuat vegetasi pesisir sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam konservasi. Kegiatan dilakukan secara gotong royong melalui tahapan identifikasi lokasi, penentuan titik tanam, praktik penanaman, edukasi pemeliharaan, dan pembagian tanggung jawab. Hasil langsung kegiatan berupa tertanamnya bibit pohon kelapa dan keterlibatan masyarakat dalam tindakan konservasi. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman praktis kepada masyarakat mengenai hubungan antara keberadaan lingkungan yang terawat dengan keberlanjutan kawasan wisata. Dengan demikian, nilai utama kegiatan tidak hanya terletak pada jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga pada upaya membangun rasa tanggung jawab terhadap sumber daya lingkungan yang menjadi aset destinasi. Temuan ini sejalan dengan Madanaguli et al. (2023), yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu isu penting dalam pengembangan pariwisata perdesaan. Pengelolaan destinasi perlu memperhatikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga sumber daya lingkungan karena kualitas lingkungan merupakan salah satu fondasi keberlanjutan kegiatan wisata.

Meskipun demikian, dampak ekologis jangka panjang dari penanaman pohon belum dapat disimpulkan dari kegiatan satu kali. Naskah secara tepat menempatkan penanaman sebagai inisiasi konservasi, bukan sebagai bukti bahwa abrasi telah berkurang atau kondisi ekologis telah membaik. Keberhasilan selanjutnya perlu dilihat dari tingkat kelangsungan hidup tanaman, konsistensi pemeliharaan, perkembangan vegetasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, kegiatan penanaman pohon memiliki nilai pemberdayaan apabila tanggung jawab pemeliharaan benar-benar dialihkan kepada masyarakat. Pembagian tanggung jawab yang telah dirancang dalam kegiatan dapat menjadi dasar bagi pembentukan *local environmental ownership*.

4. Integrasi Intervensi sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu temuan penting dari pelaksanaan PkM di Pantai Wale adalah keterkaitan antara tiga bentuk intervensi yang memiliki karakter berbeda, yaitu pelatihan Canva,

Gerakan Pantai Bersih, dan penanaman pohon. Pelatihan Canva berorientasi pada penguatan kapasitas digital; Gerakan Pantai Bersih pada partisipasi sosial dan kesadaran lingkungan; sedangkan penanaman pohon pada konservasi pesisir. Ketiganya diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata. Integrasi tersebut penting karena pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan aspek promosi. Peningkatan kemampuan mempromosikan destinasi harus diikuti dengan kemampuan masyarakat menjaga kualitas lingkungan dan terlibat dalam pengelolaan destinasi. Destinasi yang semakin dikenal melalui media digital berpotensi mengalami peningkatan kunjungan, sehingga kesiapan sosial dan lingkungan masyarakat menjadi semakin penting. Perspektif ini sejalan dengan Krittayaruangroj et al. (2023), yang menunjukkan bahwa keberlanjutan *community-based tourism* melibatkan hubungan antara partisipasi masyarakat, pemberdayaan, pengambilan keputusan, dan konservasi. Tong et al. (2024) juga menempatkan *tourism empowerment* dan *community participation* sebagai komponen penting dalam pembangunan pariwisata perdesaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks Pantai Wale, integrasi tersebut dapat dirumuskan sebagai tiga kapasitas utama, yaitu *digital capability*, *community participation*, dan *environmental stewardship*. Ketiga kapasitas tersebut selanjutnya membutuhkan *local ownership* agar dapat berkembang menjadi praktik pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Model ini menjadi salah satu kontribusi praktis program karena menghubungkan aspek ekonomi-digital, sosial, dan lingkungan dalam satu rangkaian kegiatan PkM.

5. Peran Kemitraan dalam Pelaksanaan Program

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah Desa Ulusawah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, sementara Karang Taruna, UMKM, masyarakat, mahasiswa, dan dosen berkontribusi dalam berbagai tahapan program. Kolaborasi tersebut memungkinkan kegiatan pelatihan, aksi kebersihan, dan penanaman pohon dilaksanakan secara bersama-sama.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perguruan tinggi dalam PkM tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mempertemukan pengetahuan akademik dengan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa berperan sebagai *community facilitators*, sedangkan dosen menjalankan fungsi pendampingan akademik. Pola tersebut sesuai dengan pendekatan *service-learning* dan *community engagement* yang menghubungkan pembelajaran perguruan tinggi dengan persoalan nyata masyarakat.

Rodriguez et al. (2024) menunjukkan bahwa *service-learning*, *community engagement*, *participatory action research*, dan *capacity development* dapat menjadi pendekatan penting dalam pembelajaran dan pembangunan berkelanjutan di perguruan tinggi. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa dalam program Pantai Wale tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam persoalan pembangunan

lokal. Namun demikian, partisipasi berbagai pihak selama kegiatan belum dapat langsung disebut sebagai collaborative governance yang telah mapan. Reina-Usuga et al. (2024) menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pariwisata perdesaan membutuhkan mekanisme koordinasi dan keterlibatan multipihak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi yang terbentuk selama PkM perlu dikembangkan menjadi mekanisme kelembagaan yang lebih permanen.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PkM

Pelaksanaan program memperoleh dukungan dari pemerintah desa, Karang Taruna, UMKM, masyarakat, serta kerja sama antara dosen dan mahasiswa. Dukungan tersebut menjadi faktor penting karena kegiatan PkM membutuhkan legitimasi lokal, partisipasi masyarakat, dan pendampingan teknis. Sebaliknya, terdapat dua hambatan utama, yaitu heterogenitas kemampuan digital peserta dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Heterogenitas kemampuan digital menyebabkan kebutuhan pendampingan antar peserta berbeda, sedangkan durasi program yang hanya dua hari membatasi ruang untuk melakukan penguatan keterampilan dan monitoring perubahan perilaku secara lebih mendalam.

Hambatan tersebut memberikan implikasi penting bagi desain PkM berikutnya. Pelatihan digital perlu diawali dengan pemetaan kemampuan peserta sehingga materi dapat dibedakan berdasarkan tingkat kompetensi. Peserta dengan kemampuan dasar dapat memperoleh materi pengenalan, sedangkan peserta yang lebih mampu dapat diarahkan pada produksi konten, pengelolaan akun, dan strategi pemasaran digital. Selain itu, diperlukan post-program mentoring agar keterampilan yang diperoleh tidak berhenti setelah pelatihan selesai. Hal yang sama berlaku untuk program kebersihan dan konservasi. Kegiatan satu kali dapat menjadi pemicu perubahan, tetapi belum cukup untuk memastikan keberlanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan perlu ditopang oleh kelompok lokal yang memiliki tanggung jawab jelas serta dukungan pemerintah desa.

7. Keberlanjutan Program dan Penguatan Local Ownership

Keberlanjutan merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan PkM. Program Pantai Wale telah merancang beberapa mekanisme keberlanjutan, antara lain Karang Taruna sebagai calon pengelola media promosi, UMKM sebagai pengguna materi digital, pemerintah desa sebagai pendukung promosi, kegiatan kebersihan secara berkala, dan pemeliharaan bibit oleh masyarakat.

Rancangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memindahkan tanggung jawab program dari tim perguruan tinggi kepada aktor lokal. Dalam perspektif pemberdayaan, proses tersebut sangat penting karena tujuan akhir PkM bukan menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap fasilitator eksternal, tetapi membangun kapasitas yang memungkinkan masyarakat melanjutkan praktik secara mandiri.

Konsep *local ownership* dapat dikembangkan melalui tiga mekanisme. Pertama, digital ownership, yaitu kelompok lokal memiliki dan mengelola kanal promosi

destinasi. Kedua, *environmental ownership*, yaitu masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan dan pemeliharaan vegetasi. Ketiga, *institutional ownership*, yaitu pemerintah desa memasukkan kegiatan promosi dan pemeliharaan destinasi ke dalam agenda kelembagaan desa. Strategi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, tetapi harus menghasilkan kemampuan untuk mempertahankan manfaat dan mengelola sumber daya secara mandiri. Dalam konteks ini, keberlanjutan PkM Pantai Wale sangat ditentukan oleh sejauh mana hasil kegiatan dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas rutin kelompok masyarakat dan pemerintah desa.

8. Implikasi Pembahasan terhadap Pengembangan Program PkM

Hasil PkM menunjukkan bahwa intervensi terpadu di Pantai Wale telah menghasilkan capaian pada tingkat output dan *short-term outcome*. Pelatihan Canva menghasilkan pengalaman praktis dan produk digital; Gerakan Pantai Bersih menghasilkan aksi kolektif dan perubahan langsung kondisi kawasan; sedangkan penanaman pohon menghasilkan inisiasi tindakan konservasi. Namun, hasil tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa program telah menghasilkan perubahan jangka panjang dalam pengelolaan destinasi. Belum tersedia bukti longitudinal mengenai apakah media promosi terus digunakan, apakah kegiatan kebersihan berlangsung secara rutin, dan apakah bibit yang ditanam dapat bertahan. Naskah juga secara eksplisit mengidentifikasi kebutuhan monitoring lanjutan tersebut. Oleh karena itu, tahap berikutnya perlu diarahkan pada perubahan dari *activity-based community service* menuju *outcome-oriented community empowerment*. Program lanjutan dapat menggunakan indikator yang lebih terukur, seperti konsistensi pengelolaan media sosial, jumlah konten yang diproduksi oleh kelompok lokal, frekuensi kegiatan kebersihan, tingkat kelangsungan hidup tanaman, jumlah kelompok masyarakat yang aktif, serta keberadaan dukungan kelembagaan dan anggaran desa.

Dengan pendekatan tersebut, PkM Pantai Wale tidak hanya menghasilkan kegiatan yang terdokumentasi, tetapi juga dapat menunjukkan proses perubahan yang lebih jelas dari intervensi → output → *short-term outcome* → *intermediate outcome* → *sustainability*. Pendekatan ini sekaligus memperkuat kontribusi artikel pengabdian karena menunjukkan bagaimana kegiatan yang sederhana dan kontekstual dapat menjadi pintu masuk bagi pembentukan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata pesisir.

Program menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata perdesaan akan lebih efektif apabila penguatan kapasitas digital, partisipasi masyarakat, dan kepedulian lingkungan dilakukan secara terpadu. Akan tetapi, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada keberlanjutan pendampingan, kelembagaan lokal, pembagian tanggung jawab, dan kemampuan masyarakat untuk mengambil alih pengelolaan program. Dengan demikian, capaian Pantai Wale lebih tepat dipahami sebagai fondasi awal bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan, bukan sebagai dampak akhir yang telah sepenuhnya tercapai.

SIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Pantai Wale menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang mengintegrasikan penguatan kapasitas digital, partisipasi masyarakat, dan kepedulian lingkungan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat. Pelatihan pembuatan media promosi menggunakan Canva menghasilkan peningkatan pengalaman praktis peserta dalam memproduksi materi promosi digital, sekaligus menghasilkan aset promosi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku UMKM.

Gerakan Pantai Bersih dan Sadar Wisata mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan serta memperkuat pengalaman gotong royong antaraktor lokal. Sementara itu, kegiatan penanaman pohon menjadi bentuk awal *environmental stewardship* melalui keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir. Kedua kegiatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas lingkungan dapat dikembangkan tidak hanya sebagai kegiatan fisik, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan destinasi. Capaian program paling kuat terlihat pada tingkat output dan *short-term outcome*, sedangkan perubahan jangka menengah dan dampak jangka panjang belum dapat dipastikan karena keterbatasan durasi pelaksanaan dan belum adanya monitoring longitudinal. Oleh karena itu, keberhasilan program pada tahap ini lebih tepat dipahami sebagai fondasi awal pemberdayaan masyarakat, bukan sebagai bukti telah tercapainya dampak ekonomi, sosial, dan ekologis jangka panjang.

Keberlanjutan program sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan kelembagaan lokal untuk mengambil alih pengelolaan hasil kegiatan. Penguatan peran Karang Taruna dalam pengelolaan media digital, keterlibatan UMKM dalam pemanfaatan materi promosi, kegiatan kebersihan secara berkala, serta pemeliharaan tanaman merupakan strategi penting untuk membangun local ownership dan mengurangi ketergantungan terhadap pendampingan perguruan tinggi. Dengan demikian, model pengabdian di Pantai Wale menunjukkan bahwa integrasi kapasitas digital, partisipasi komunitas, dan kepedulian lingkungan dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk mendukung pengembangan pariwisata pesisir berbasis masyarakat. Program lanjutan perlu diarahkan pada pendampingan dan monitoring secara berkala agar capaian awal tersebut berkembang menjadi praktik pengelolaan destinasi yang mandiri, berkelanjutan, dan terlembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, W., & Syuraini, S. (2023). The implementation of community participation guidebook development as an effort in environmental preservation of Air Manis Beach in Padang City. *Journal of Nonformal Education*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/jne.v9i1.38596>
- Amerta, I. M. S., Putra, I. B. U., Sitiari, N. W., Sentosa, I., & Sharin, F. H. (2025). The future of rural tourism in Bali, Indonesia: The role of social media platform. *E-Journal of Tourism*, 12(2). <https://doi.org/10.24922/eot.v12i2.2178>

- Bello, F. G., Lovelock, B., & Carr, N. (2023). Re-examining the participation and empowerment nexus: Applications to community-based tourism. *World Development Perspectives*, 31, 100518. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2023.100518>
- Krittayaruangroj, K., Suriyankietkaew, S., & Hallinger, P. (2023). Research on sustainability in community-based tourism: A bibliometric review and future directions. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 28(9), 1031–1051. <https://doi.org/10.1080/10941665.2023.2276477>
- Lapeyre, R. (2010). Community-based tourism as a sustainable solution to maximise impacts locally? The Tsiseb Conservancy case, Namibia. *Development Southern Africa*, 27(5), 757–772. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2010.522837>
- Lapuz, M. C. M. (2023). The role of local community empowerment in the digital transformation of rural tourism development in the Philippines. *Technology in Society*, 74, 102308. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102308>
- Li, Y., Ismail, M. A., & Aminuddin, A. (2024). How has rural tourism influenced the sustainable development of traditional villages? A systematic literature review. *Heliyon*, 10(4), e25627. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25627>
- Madanaguli, A., Dhir, A., Josephe, R. P., Albishri, N. A., & Srivastava, S. (2023). Environmental sustainability practices and strategies in the rural tourism and hospitality sector: A systematic literature review and suggestions for future research. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 23(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/15022250.2023.2174179>
- Maulana, M., Deliana, D., & Indah, T. (2025). Integrating digital marketing communication and community participation for sustainable tourism development: A case study of Sumberbulu Tourism Village, Indonesia. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 13(1), 76–87. <https://doi.org/10.12928/channel.v13i1.1061>
- Prihanto, Y. J. N., Utomo, P., & Rinto, F. S. M. (2025). Development of digital promotional media for tourism local based on the Cirarab Village community, Tangerang Regency. *Community Empowerment*, 10(11), 2110–2119. <https://doi.org/10.31603/ce.14832>
- Rasyidah, Erianda, A., Alanda, A., & Hidayat, R. (2023). Systematic literature review: Digitalization of rural tourism towards sustainable tourism. *International Journal of Advanced Science Computing and Engineering*, 5(3), 247–256. <https://doi.org/10.62527/ijasce.5.3.134>
- Reina-Usuga, L., Camino, F., Gomez-Casero, G., & Jara Alba, C. A. (2024). Rural tourism initiatives and their relationship to collaborative governance and perceived value: A review of recent research and trends. *Journal of Destination Marketing & Management*, 34, 100926. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2024.100926>
- Riyanto, R., Iqbal, M., Supriono, S., Fahmi, M. R. A., & Yuliaji, E. S. (2023). The effect of community involvement and perceived impact on residents' overall well-being: Evidence in Malang marine tourism. *Cogent Business & Management*, 10(3), 2270800. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2270800>

- Rodríguez-Zurita, D., Jaya-Montalvo, M., Moreira-Arboleda, J., Raya-Diez, E., & Carrión-Mero, P. (2024). Sustainable development through service learning and community engagement in higher education: A systematic literature review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 26(1), 158–201. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2023-0461>
- Tong, J., Li, Y., & Yang, Y. (2024). System construction, tourism empowerment, and community participation: The sustainable way of rural tourism development. *Sustainability*, 16(1), 422. <https://doi.org/10.3390/su16010422>
- Wijana, P. A., Pratama, I. P. A. A. P., Widjaya, I. G. N. O., & Pitanatri, I. A. (2026). Digital transformation for sustainable rural tourism: Evaluating branding competencies in Taro and Keliki tourism villages. *Global Review of Tourism and Social Sciences*, 2(2), 153–165. <https://doi.org/10.53893/grtss.v2i2.474>
- World Tourism Organization. (2023). *Tourism and rural development: A policy perspective*. <https://doi.org/10.18111/9789284424306>
- Yuliani, N. L., Afif, N., & Kusumaningrum, S. B. C. (2025). Empowering BUMDes Guyub Rukun: Branding strategies and digital marketing for tourism village. *Community Empowerment*, 10(4), 884–893. <https://doi.org/10.31603/ce.10553>